



Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan Desa

Raichan Zuhdie¹, Indra Aditya², Evi Priyanti³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

²Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

³Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

		Abstrak
Received:	02 Juli 2026	<i>Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekarsari dalam menjalankan fungsi kelembagaan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan penentuan informan secara purposive. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD Desa Mekarsari belum sepenuhnya optimal. Dari empat indikator kinerja organisasi, yaitu proses kerja, inisiatif individu, interaksi organisasi, dan kemampuan adaptif, hanya dimensi interaksi organisasi yang menunjukkan capaian relatif baik. Keterbatasan partisipasi anggota, lemahnya inisiatif formal, serta rendahnya kemampuan adaptasi terhadap teknologi dan administrasi desa menjadi hambatan utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pembinaan kelembagaan BPD secara berkelanjutan pada tingkat pemerintahan desa lokal Indonesia. bidang akuntansi.</i>
Revised:	10 Juli 2026	
Accepted:	13 Juli 2026	
Kata Kunci:		<i>kinerja BPD; pemerintahan desa; kelembagaan desa</i>

Kata Kunci: kinerja BPD; pemerintahan desa; kelembagaan desa

(*) Corresponding Author: 2110631180180@student.unsika.ac.id

How to Cite: Zuhdie, R., Aditya, I., & Priyanti, E. (2026). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(7.A), 221-226. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14711>.

PENDAHULUAN

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan hingga tingkat desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan prakarsa lokal, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kinerja lembaga-lembaga desa yang menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan (Widjaja, 2014, hlm. 165). Dalam konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menempati posisi strategis sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang berperan dalam mewujudkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas di tingkat lokal.

Secara normatif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 telah menetapkan fungsi utama BPD, meliputi pembahasan dan penetapan peraturan desa bersama kepala desa, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Namun, berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan optimal. Kelemahan yang sering ditemukan meliputi rendahnya kompetensi sumber daya manusia, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta terbatasnya kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat (Harahap, 2020).

Kesenjangan antara ketentuan normatif (das Sollen) dan praktik empiris di lapangan (das

Sein) menjadi persoalan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun regulasi telah menempatkan BPD sebagai aktor penting dalam tata kelola desa, realitas menunjukkan masih adanya aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi, rendahnya kehadiran dan keaktifan anggota BPD dalam forum musyawarah desa, serta keterbatasan kemampuan administrasi berbasis digital. Kondisi ini semakin diperparah oleh minimnya pembinaan dan evaluasi kelembagaan dari pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa Pasal 112 dan 115.

Urgensi penelitian mengenai kinerja BPD semakin meningkat seiring dengan tuntutan tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi administrasi pemerintahan. Lemahnya kinerja BPD tidak hanya berdampak pada rendahnya kualitas penyerapan aspirasi masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi pemerintahan desa dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi desa. Oleh karena itu, pengkajian kinerja BPD menjadi penting baik secara ilmiah untuk memperkaya kajian pemerintahan desa, maupun secara praktis sebagai dasar perumusan kebijakan penguatan kelembagaan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi kelembagaan desa, dengan studi kasus di Desa Mekarsari Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Artikel ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan desa dengan menawarkan analisis kinerja BPD menggunakan kerangka indikator kinerja organisasi menurut Robbins (2021), yang meliputi proses kerja, inisiatif individu, interaksi organisasi, dan kemampuan adaptif. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kinerja BPD serta rekomendasi strategis untuk penguatan kelembagaan desa di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi kelembagaan desa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena kelembagaan secara kontekstual dan holistik berdasarkan pengalaman para aktor yang terlibat (Sugiyono, 2018). Penelitian dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, yang dipilih secara purposif karena relevansinya dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan pada periode September hingga November 2025 melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman terhadap kinerja BPD, meliputi Ketua dan anggota BPD, Kepala Desa, Camat Cipicung, serta tokoh masyarakat. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi, dengan indikator kinerja mengacu pada kerangka Robbins yang mencakup proses kerja, inisiatif individu, interaksi organisasi, dan kemampuan adaptif (Robbins, 2021). Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2018), serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan metode, member check, dan peer debriefing.

untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan (Hadi, 2016).

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekarsari dalam menjalankan fungsi kelembagaan desa belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan empat indikator kinerja organisasi menurut Robbins (2021), dimensi interaksi organisasi relatif berjalan cukup baik, sementara proses kerja, inisiatif individu, dan kemampuan adaptif masih menghadapi berbagai keterbatasan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MEKARSARI KECAMATAN CIPICUNG KABUPATEN KUNINGAN				
DAFTAR HADIR				
Hari/Tanggal : Sabtu, 26 Juli 2023				
Waktu : Pukul 19.30 WIB s.d. Selesai				
Acara : Musyawarah Desa I				
Tempat : Halaman Rumah Desa I				
No	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	YANA	Desa	RT 03	1.
2.	OPRA	RT 03	RT 03	2.
3.	Saktim	RT 03	RT 03	3.
4.	Toto	RT 03	RT 03	4.
5.	MONITA	RT 03	RT 03	5.
6.	REY	RT 03	RT 03	6.
7.	SAITAN	RT 03	RT 03	7.
8.	EYE	RT 03	RT 03	8.
9.	Jahidi	RT 03	RT 03	9.
10.	IDING	RT 03	RT 03	10.
11.	SUKITO	RT 03	RT 03	11.
12.	EXO	RT 03	RT 03	12.
13.	MAMANI	RT 03	RT 03	13.
14.	WAKIL	RT 03	RT 03	14.
15.	WAKIL	RT 03	RT 03	15.
16.	KANDAS	RT 03	RT 03	16.
17.	DIDI	RT 03	RT 03	17.
18.	UDIN	RT 03	RT 03	18.
19.	ADIN	RT 03	RT 03	19.
20.	OPRA	RT 03	RT 03	20.
21.	JANI	RT 03	RT 03	21.
22.	Linda S	Karang	RT 03	22.
23.	KANDAS	Karang	RT 03	23.
24.	YANA	Karang	RT 03	24.
25.	Pita	Karang	RT 03	25.
26.	Helela K.	Karang	RT 03	26.
27.	BOKARI	Karang	RT 03	27.
28.	Katam	Karang	RT 03	28.
29.	WASELIDIN	Karang	RT 03	29.
30.	KANDAS	Karang	RT 03	30.
31.	KANDAS	Karang	RT 03	31.
32.	YANA	Karang	RT 03	32.
33.	YANA	Karang	RT 03	33.
34.	ANIS	Karang	RT 03	34.
35.	WAKIL	Karang	RT 03	35.
36.	WAKIL	Karang	RT 03	36.
37.	IDA	Karang	RT 03	37.
38.	AL GHAZALI	Karang	RT 03	38.
39.	AL GHAZALI	Karang	RT 03	39.
40.	AL GHAZALI	Karang	RT 03	40.
41.				41.
42.				42.
43.				43.
44.				44.
45.				45.
46.				46.
47.				47.
48.				48.
49.				49.
50.				50.
51.				51.

Pada dimensi proses kerja, partisipasi anggota BPD dalam rapat dan forum perencanaan desa tergolong cukup, namun belum merata. Sebagian anggota tidak selalu hadir secara fisik dalam rapat karena faktor usia lanjut dan keterbatasan kondisi fisik, sehingga memengaruhi efektivitas pembahasan dan pengambilan keputusan. Keterbatasan penguasaan teknologi informasi juga berdampak pada rendahnya adaptasi terhadap sistem administrasi berbasis digital, terutama dalam pengelolaan dokumen dan komunikasi kelembagaan.

Dimensi inisiatif individu menunjukkan bahwa sebagian anggota BPD masih cenderung pasif dalam menyampaikan pendapat dan solusi, terutama dalam forum formal. Meskipun terdapat anggota yang berinisiatif menyampaikan gagasan melalui diskusi informal, inisiatif tersebut belum terinstitusionalisasi secara sistematis dalam mekanisme kerja BPD. Kondisi ini menyebabkan proses pemecahan masalah belum berjalan secara optimal dan respons terhadap aspirasi masyarakat masih terbatas.



Pada dimensi interaksi organisasi, pola komunikasi dan kerja sama internal antaranggota BPD relatif berjalan dengan baik. Komunikasi formal melalui rapat serta komunikasi informal melalui media seperti grup WhatsApp memungkinkan koordinasi tetap berlangsung meskipun terdapat keterbatasan kehadiran fisik. Kolaborasi antaranggota juga menunjukkan adanya upaya saling melengkapi peran dan berbagi informasi, sehingga fungsi kelembagaan tetap dapat dijalankan meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

Sementara itu, pada dimensi kemampuan adaptif, BPD menghadapi tantangan dalam merespons perubahan regulasi, tuntutan administrasi digital, serta dinamika kebutuhan masyarakat desa. Faktor usia, perbedaan latar belakang pendidikan, serta minimnya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah daerah menyebabkan proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas anggota berlangsung lambat. Akibatnya, adaptasi terhadap sistem kerja yang lebih modern dan responsif belum sepenuhnya tercapai.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kinerja BPD sebagai lembaga perwakilan desa tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh kualitas proses kerja dan kapasitas internal organisasi. Sejalan dengan pandangan Robbins (2021), kinerja organisasi publik perlu dianalisis secara menyeluruh melalui proses kerja, inisiatif individu, interaksi organisasi, dan kemampuan adaptif. Dalam konteks BPD Desa Mekarsari, kelemahan pada proses kerja dan inisiatif individu menunjukkan bahwa kinerja kelembagaan masih berorientasi pada rutinitas administratif, belum sepenuhnya mencerminkan peran strategis BPD sebagai pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat.

Rendahnya partisipasi aktif sebagian anggota dalam forum formal memperkuat temuan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan faktor usia menjadi hambatan utama dalam optimalisasi kinerja BPD (Devardhini et al., 2024). Kondisi ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ardiansyah dan Rodiyah (2024) yang menunjukkan bahwa peran strategis BPD sering kali tereduksi akibat lemahnya kapasitas internal dan rendahnya dukungan kelembagaan.

Meskipun demikian, temuan terkait interaksi organisasi menunjukkan adanya modal sosial yang cukup kuat dalam tubuh BPD. Pola komunikasi informal yang tetap terjaga mengindikasikan adanya komitmen kolektif untuk mempertahankan fungsi kelembagaan, sebagaimana dikemukakan oleh Wijaya et al. (2021) bahwa kinerja organisasi publik sangat dipengaruhi oleh kualitas kerja sama dan komunikasi internal. Temuan ini memperkaya kajian kinerja BPD dengan menunjukkan bahwa keterbatasan struktural tidak selalu menghilangkan potensi kolaboratif dalam organisasi desa.

Dari sisi kemampuan adaptif, keterbatasan penguasaan teknologi dan minimnya pelatihan mencerminkan lemahnya kebijakan penguatan kapasitas BPD di tingkat daerah. Hal

ini memperkuat argumen Nasrin et al. (2023) yang menyatakan bahwa tanpa dukungan pelatihan berkelanjutan, BPD cenderung kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan regulasi dan sistem pemerintahan desa yang semakin kompleks. Secara praktis, temuan ini mengindikasikan perlunya desain kebijakan pembinaan BPD yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan aktual anggota, terutama bagi anggota dengan latar belakang usia lanjut.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat relevansi teori kinerja Robbins (2021) dalam konteks kelembagaan desa, khususnya dalam menjelaskan keterkaitan antara kapasitas individu, dinamika organisasi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi penguatan BPD melalui pelatihan berbasis kebutuhan, pemanfaatan teknologi yang ramah pengguna, serta penguatan mekanisme partisipasi internal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu lokasi studi kasus, sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif antar desa atau mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh gambaran kinerja BPD yang lebih luas dan mendalam, terutama dalam konteks implementasi tata kelola desa berbasis digital.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mekarsari dalam menjalankan fungsi kelembagaan desa belum sepenuhnya optimal. Dari empat indikator kinerja organisasi, interaksi organisasi merupakan dimensi yang relatif berjalan lebih baik, sementara proses kerja, inisiatif individu, dan kemampuan adaptif masih menghadapi berbagai keterbatasan. Rendahnya partisipasi aktif sebagian anggota, lemahnya inisiatif dalam forum formal, serta keterbatasan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan administrasi desa menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja BPD.

Temuan ini menegaskan bahwa kinerja BPD dipengaruhi oleh keterkaitan antara kapasitas individu, dinamika organisasi, dan kemampuan adaptasi kelembagaan, sehingga pendekatan kinerja multidimensional menjadi relevan dalam kajian pemerintahan desa. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas BPD melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan kompetensi teknis, dan pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan komparatif atau metode campuran guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kinerja BPD dalam berbagai konteks desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R., & Rodiyah, R. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 45–58.
- Devardhini, A., Putri, N. A., & Rahman, F. (2024). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam perspektif tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 101–115.
- Hadi, S. (2016). *Metodologi penelitian pendidikan*. Andi Offset.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

- Nasrin, S., Abdullah, M., & Pratama, R. (2023). Capacity building of village consultative bodies in local governance. *Journal of Public Administration Studies*, 8(2), 67–79.
- Robbins, S. P. (2021). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson Education.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson Education.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wijaya, A., Prasetyo, D., & Lestari, S. (2021). Organizational communication and performance in public sector institutions. *Journal of Public Sector Management*, 6(1), 23–35.